



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 29 Agustus 2012

Halaman: 4

JPD Cair Awal September

JOGJA - Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) tahap pertama bakal dicairkan awal September. Total dana yang dicairkan mencapai Rp 7 miliar untuk sekolah negeri.

UPT Pengelola Jaminan Pendidikan Daerah Disdik Kota Jogja saat ini tengah melakukan proses pencairan. Total penerimanya sebanyak 7.404 siswa dengan rincian jenjang SD sebanyak 3.664 siswa dengan alokasi anggaran Rp 659,52 juta. SMP sebanyak 2.045 siswa dengan anggaran Rp 511,250 juta, SMA sebanyak 224 orang dengan alokasi dana Rp 580,950 juta. Sedangkan penerima JPD untuk jenjang SMK sebanyak 1.671 orang dengan anggaran Rp 4,533 miliar. "Total anggaran yang dicairkan untuk tahap pertama mencapai Rp 6 miliar lebih," kata Kepala UPT, Suryatmi ditemui di kantornya, Selasa (28/8).

Adapun alokasi dana per siswa per tahun untuk SD negeri sebesar Rp 180 ribu. Di jenjang SMP, diberi dana Rp 250 ribu per anak per tahun. Di jenjang SMA, besarannya bervariasi yaitu Rp 1,9 juta untuk pemegang KMS kelas XI dan XII dan Rp 2,35 juta untuk kelas X. Sedangkan untuk siswa kelas X SMK diberi anggaran Rp 3 juta per siswa per tahun dan Rp 2,550 juta untuk kelas XI dan XII per siswa per tahun.

Dia mengatakan belum semua dana JPD disalurkan karena banyak sekolah yang belum mengumpulkan berkas pencairan. Total anggaran untuk siswa pemegang KMS baik swasta maupun negeri Rp 14,671 miliar. "Cepat tidaknya pencairan dana JPD tergantung partisipasi sekolah maupun siswa itu sendiri. Kalau siswanya tidak mengumpulkan dokumen, sekolah tentu tidak bisa memproses pengajuan pencairan kan," katanya.

Namun, pihaknya juga tidak mungkin menunggu seluruh sekolah mengajukan proposal pencairan. Oleh karena itu, data yang sudah masuk saat ini diproses dana JPD-nya. Sedangkan yang terlambat akan dimasukkan untuk pencairan tahap kedua. "Pencairan akan dilakukan dengan transfer ke rekening sekolah," ujarnya.

Sedangkan alokasi JPD untuk sekolah swasta sebesar Rp 6,491 miliar yang diperkirakan cair pada Oktober setelah P-APBD digedok. Tahun ini, JPD sekolah swasta tidak lagi ada di pos bantuan sosial namun masuk pos anggaran belanja langsung. Cara ini dianggap memudahkan pengajuan pencairan karena sekolah hanya akan mengajukan proposal, bukan by name seperti sebelumnya. (sit/iwa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. JPD			

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005